Isu Sepekan
Bidang Ekkuinbang, Komisi VI
Minggu ke-2 Juni
(5 s.d. 11 Juni 2023)
2023

Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

MEWASPADAI *EUROPEAN UNION DEFORESTATION FREE REGULATION*

Dian Cahyaningrum
Analis Legislatif Ahli Madya
dian.cahyaningrum@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

European Union Deforestation-Free Regulation (EUDR) telah disahkan oleh parlemen Eropa pada April 2023 dan resmi berlaku pada 16 Mei 2023 (efektif Desember 2024). Dalam regulasi tersebut, setiap eksportir wajib menyerahkan dokumen uji tuntas dan verifikasi serta menjamin produknya tidak berasal dari kawasan hasil penggundulan hutan (deforestasi) yang dilakukan mulai 1 Januari 2021. Apabila ditemukan pelanggaran, eksportir akan dikenai denda hingga 4% dari pendapatan yang diperoleh di Uni Eropa. Produk-produk ekspor yang dimaksud adalah minyak sawit dan produk turunannya, arang, kopi, kedelai, kakao, daging sapi, kayu, karet, kertas, kulit, dan produk turunannya.

Mengacu pada ketentuan EUDR tersebut, sejumlah besar komoditas unggulan Indonesia seperti minyak sawit dan produk turunannya, karet, kopi, kulit dan produk turunannya, serta kakao bakal dilarang masuk ke Uni Eropa (UE) jika tidak lolos dalam uji tuntas deforestasi. Hal ini akan berdampak pada ekonomi Indonesia karena dapat mengancam ekspor produk-produk tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, EUDR berdampak pada ekonomi secara langsung karena ekspor di sektor kehutanan US $6 miliar atau Rp90 triliun. Ancaman EUDR terhadap ekonomi Indonesia bahkan semakin besar apabila ditambah dengan komoditas minyak sawit, apalagi Indonesia adalah produsen minyak sawit terbesar dunia. Ekspor minyak sawit Indonesia termasuk ke UE juga cukup besar.

Berdasarkan data United States Department of Agriculture (USDA), produksi minyak sawit Indonesia mencapai 45,5 juta ton pada periode 2022-2023, dari proyeksi total kebutuhan CPO global yang mencapai 77,2 juta ton. Ini berarti Indonesia menguasai sekitar 58,92% pasar CPO global. Berdasarkan data resmi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), produksi CPO pada 2022 mencapai 46,72 juta ton, turun 0,34% dari produksi 2021 sebanyak 46,88 juta ton. Sementara konsumsi CPO dalam negeri pada 2022 mencapai 20,96 juta ton, lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2021 sebesar 18,42 juta ton. Adapun nilai ekspor CPO olahan dan turunannya pada 2022 tercatat mencapai US $39,28 miliar, lebih tinggi dari tahun 2021 sebesar US $35,5 miliar. Sementara Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor produk sawit Indonesia ke 3 negara anggota UE yaitu Belanda, Spanyol, dan Italia sepanjang tahun 2022 mencapai US $2,0 miliar.

Menurut Ketua Sekretariat Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Fortasbi), Rukaiyah Rafiq, ketentuan sertifikasi EUDR seharusnya dapat disesuaikan dengan standar yang sudah diberlakukan di Indonesia, seperti *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) dan Indonesia *Sustainable Palm Oil* (ISPO). RSPO yang dibentuk pada tahun 2004 tersebut bertujuan untuk mempromosikan pertumbuhan dan penggunaan produk kelapa sawit berkelanjutan dengan standar global. Bahkan ISPO dan RSPO memiliki standar yang lebih

tinggi dibandingkan EUDR. Standar tersebut diantaranya mengatur mengenai hak masyarakat adat, hak asasi manusia, hak pekerja, dan kesetaraan gender. Namun permasalahannya perkembangan sertifikasi RSPO terhadap para petani swadaya cenderung melambat. melansir dari laman resmi RSPO, tercatat hanya 10.675 petani swadaya di Indonesia dengan luas total 26,191 hektar yang memiliki sertifikasi RSPO. Oleh karena itu, EUDR dikhawatirkan dapat mengancam nasib petani swadaya, terutama petani swadaya yang belum memiliki sertifikasi RSPO dan ISPO.

Atensi DPR

European Union Deforestation-Free Regulation (EUDR) dikhawatirkan dapat mengakibatkan ekspor komoditas unggulan Indonesia di sektor pertanian dan kehutanan, terutama minyak kelapa sawit menurun karena tidak dapat masuk ke Uni Eropa (UE) jika tidak lolos uji tuntas deforestasi. Nasib petani swadaya terutama yang belum memiliki sertifikasi RSPO dan ISPO juga dikhawatirkan terancam karena tidak dapat memenuhi EUDR. Oleh karena itu persoalan EUDR perlu dicarikan solusinya. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, DPR RI khususnya Komisi VI perlu mendorong pemerintah untuk: 1) melakukan diplomasi menolak EUDR; 2) melakukan negosiasi agar ISPO dan RSPO dapat diadopsi dalam EUDR sehingga minyak sawit yang telah memiliki sertifikasi ISPO dan RSPO dapat diekspor ke UE; 3) membantu dan melakukan pendampingan terhadap produsen/eksportir terutama petani swadaya agar dapat memenuhi standar EUDR; dan 4) mengupayakan pembukaan pasar baru selain UE untuk meningkatkan ekspor.

Sumber

Bisnis Indonesia, 8 Juni 2023;
Kompas, 9 Juni 2023;
kompas.id, 2 Juni 2023.

Minggu ke-2 Juni
(5 s.d. 11 Juni 2023)

2023

IsuSepekan

Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

https://puslit.dpr.go.id
@anlegbkofficial

EDITOR
Polhukam Simela Victor M., Prayudi, Novianto M. Hantoro
Ekkuinbang Sri Nurhayati Q., Sulasi Rongiyati, Rafika Sari, Eka Budiyanti, Dewi Wuryandani
Kesra Yulia Indahri, Trias Palupi K., Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER
Dewi Sendhikasari D., Sita Hidriyah, Noverdi Puja S., Anih S. Suryani, Teddy Prasetiawan, T. Ade Surya, Masyithah Aulia A., Yosephus Mainake, Mohammad Teja, Nur Sholikah P.S., Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023